

**Judul** : Jemaahnya Kaya, Bisa Biayai Sendiri: Anggaran Untuk Haji Khusus  
**Tanggal** : Jumat, 31 Maret 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 3



Delmeria

Anggaran Untuk Haji Khusus

# Jemaahnya Kaya, Bisa Biayai Diri Sendiri

KOMISI VIII DPR menolak rencana Kementerian Agama (Kemenag) agar Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5,6 miliar untuk jemaah haji khusus di tahun 2023. Sebab, jemaah haji khusus ini memiliki kemampuan materi berlebih yang mampu membiayai perjalanan mereka

sendiri tanpa ditopang Pemerintah. "Jadi untuk apa lagi minta ke negara untuk itu," kata anggota Komisi VIII DPR Delmeria dalam Rapat Kerja bersama Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief di Gedung Parlemen, Jakarta, kemarin.

Delmeria mengatakan, setoran awal haji khusus ini sangat tinggi, yakni sebesar 8.000 dolar Amerika Serikat (AS). Jumlah tersebut disetorkan ke BPKH dengan nilai manfaat yang sama. Adapun penggunaan jemaah haji khusus tahun 2022 lalu sebanyak 2.942 dengan nilai manfaat yang diterima 23.536

dolar AS per jemaah.

"Artinya kan dia sudah haji khusus. Artinya dengan setoran awal saja 8.000 dolar AS saja dia sanggup, untuk apa lagi kita biayai," sambung politisi Fraksi Nasdem ini. Harusnya, lanjut dia, beban untuk keberangkatan haji ditanggung oleh masing-masing peserta jemaah haji khusus. Dia keberatan kalau negara atau BPKH mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan perjalanan haji mereka. "Jangan lagi jadi beban kita. Kalau nggak, ya jangan haji khusus. Kalau reguler saja," jelasnya. Dia bilang, Pemerintah mesti-

nya lebih fokus memikirkan nasib jemaah haji reguler yang memang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Beda dengan para jemaah haji khusus yang mampu membayar Visa Furoda, hingga memilih travel yang sesuai dengan keinginan mereka. "Sekarang tinggal Kemenag bekerja sama dengan travel-travel ini mengawasi mereka. Itu saja jalannya," ujarnya. Jika ada jemaah haji khusus yang merasa ditipu, Kemenag tinggal menindaklanjuti laporan tersebut. Tentunya laporan tersebut harus ditindaklanjuti untuk

memastikan tidak ada travel nakal di sebagai pelaksana ibadah haji khusus ini. "Tapi saya rasa travel nakal ini sulit terjadi karena jemaah haji khusus ini rata-rata orang pintar dan berpikirnya sudah berbeda dengan jemaah reguler," tegasnya. Hal senada di lontarkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR Laksdya Moekhlis Sidik. Dia mempertanyakan alasan Kemenag mengusulkan Rp 5,6 miliar ke BPKH untuk mengurus pelaksanaan ibadah haji khusus ini. "Kenapa justru mengambil keuangan ke BPKH, tidak dibebankan ke jemaah,"

tanyanya.

Sementara Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latief menuturkan, berdasar UU Tahun 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Haji Khusus mendapatkan kuota sebesar 8 persen dari jumlah kuota haji Indonesia. Adapun kuota haji tahun 2023 Indonesia sebanyak 221 ribu jemaah dengan jumlah kuota haji khusus sebanyak 17.680 jemaah. "Dan alhamdulillah tahun ini kuota haji khusus dapat kami sesuaikan sesuai undang-undang betul-betul 8 persen," katanya. Menurut Hilman, setoran awal

haji khusus dari BPKH kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) adalah sebesar 8.000 dolar AS per jemaah. Adapun pengembalian keuangan ibadah haji khusus sampai 23 Maret sebanyak 2.942 jemaah dengan nilai 23.536.000 dolar AS.

Soal usulan penggunaan nilai manfaat, Hilman mengakui, memang terdapat beberapa layanan jemaah haji khusus yang tidak diberikan karena anggaran belum tersedia. Adapun usulan kebutuhan penggunaan nilai manfaat mencakup pengadaan dan pendistribusian gelang, maintenance. ■ KAL